

**DATA INVENTARISASI PERATURAN DAERAH
TAHUN 2003 s.d 2025**

| NO. | NAMA PERATURAN | PENG-UNDANGAN | STATUS | HASIL PENELUSURAN | REKOMENDASI | SKPD | PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|-------------------|--|---------------|---------|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
| Tahun 2025 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik | 08 April 2025 | Berlaku | <p>Dalam PERDA No. 1 Thn 2025, memuat ketentuan pengaturan teknis Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik dalam 5 amanat Pasal sebagai berikut:</p> <p>a) Pasal 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek dan objek sasaran Subjek Sasaran pengembangan pertanian Organik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>b) Pasal 13 ayat (3) : Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Unit Pengelola Sistem Jaminan Partisipatif diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal 14 : Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>d) Pasal 15 : Ketentuan</p> | Agar segera menetapkan PERBUP sebagai petunjuk Pelaksanaan PERDA sesuai ketentuan yang didelegasikan dan dapat disatukan dalam 1 PERBUP atau beberapa PERBUP sesuai ruang lingkup yang diatur. | Dinas Pertanian (Inisiatif DPRD) | BELUM ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|---|--|---|---------------------|---------------|
| | | | | <p>mengenai tata cara pemberian disinsentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>e) Pasal 17 ayat (2) : Dalam rangka penyelenggaraan pertanian Organik di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Forum Pertanian Organik Daerah.</p> | | | | |
| 2 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2025 Tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman | 08 April 2025 | Berlaku | <p>Dalam PERDA No. 2 Thn 2025, memuat ketentuan pengaturan teknis Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman dalam 6 amanat Pasal sebagai berikut:</p> <p>a) Pasal 7 : Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi (Inventarisasi Pohon dan inventarisasi kondisi lingkungan) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>b) Pasal 12 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan Pengelolaan Pohon</p> | Agar segera menetapkan PERBUP sebagai petunjuk Pelaksanaan PERDA sesuai ketentuan yang didelegasikan dan dapat disatukan dalam 1 PERBUP atau beberapa PERBUP sesuai ruang lingkup yang diatur. | Dinas Lingkungan Hidup (inisiatif DPRD) | BELUM ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|--|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal 13 : Ketentuan mengenai penetapan pembagian RTH publik, Jalur Hijau dan Taman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>d) Pasal 30 ayat (4) : Ketentuan mengenai tata cara peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pohon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>e) Pasal 36 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>f) Pasal 44 : Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penjatuhan sanksi administratif dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> | | | | |
| 3 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan | 02 Mei 2025 | Berlaku | Memperhatikan ketentuan PERDA ini pada Pasal 5: Pendidikan Kepramukaan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah, Pasal | Agar dibentuk PERBUP sebagai petunjuk pelaksanaan PERDA. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | BELUM ADA PENGAJUAN | BELUM SELSAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|---|---|--|----------------|---------------|
| | | | | <p>10: Dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan merujuk kepada: a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pasal 19 ayat (2): Tanggung Jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada Perangkat Daerah berada pada kepala Perangkat Daerah, maka PERDA ini, seharusnya memiliki petunjuk pelaksanaan PERDA yang menjadi pedoman teknis bagi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.</p> | | | | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah | 02 Mei 2025 | Berlaku | <p>Dengan adanya perubahan nomenklatur nama Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 3 huruf e angka 1 PERDA ini, maka Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tersebut harus dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun</p> | <p>Agar membentuk PERBUP tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan</p> | <p>Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah</p> | BELUM DIAJUKAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|--|---|--------------------------------|--|---------------|
| | | | | 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur khusus Perangkat Daerah yang terkait. | Pemerintah Daerah. | | | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2025 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 02 Mei 2025 | Berlaku | <p>PERDA ini mengatur sekitar 17 Pasal sebagai perintah untuk mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yakni:</p> <p>a) Pasal 49 Ayat (5) : Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PERKADA.</p> <p>b) Pasal 56 Ayat (3) : Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Pasal 59 Ayat (6) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam</p> | <p>a) menetapkan PERKADA sebagai amanat PERDA No. 5 Thn 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>b) Materi PERKADA sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dituangkan didalam PERKADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai jenis materinya, atau berdiri sendiri sesuai dengan ruang lingkup yang akan di atur dan/atau kondisi yang menyebabkan PERKADA harud diatur terpisah.</p> | Badan Keuangan dan Aset Daerah | | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d) Pasal 62 Ayat (3) : Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam PERKADA.</p> <p>e) Pasal 79 Ayat (4) : Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f) Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) : Berdasarkan persetujuan bersama (Catatan: Terhadap APBD), Bupati menyiapkan rancangan PERKADA tentang Penjabaran APBD dan Pasal 110 Ayat (1) : Penetapan PERKADA tentang Penjabaran APBD.</p> <p>g) Pasal 104 Ayat (1): Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun</p> | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>rancangan PERKADA tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. (Catatan: kondisi situasional).</p> <p>h) Pasal 118 : Terhadap kewajiban pemindahbukuan yang secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam PERKADA dan ketentuan sesuai rencana pengeluaran sebagai operasi rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah dari Rekening Pengeluaran ditetapkan dalam PERKADA.</p> <p>i) Pasal 127 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran Kas dan SPD diatur dalam PERKADA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j) Pasal 128 ayat (2) : Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,</p> | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyeteroran penerimaan (Catatan: pada ayat 1 diatur paling lambat dalam waktu 1 hari) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam PERKADA.</p> <p>k) Pasal 135 ayat (2) : Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan PERKADA.</p> <p>l) Pasal 144 : Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (Catatan : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD) dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam PERKADA.</p> <p>m) Pasal 155 Ayat (2) : Pergeseran anggaran antar obyek belanja,</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan PERKADA tentang Penjabaran APBD.

n) Pasal 155 Ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o) Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) : Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

p) Pasal 182 Ayat (4) : Atas dasar persetujuan bersama (Catatan: terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dan DPRD) sebagaimana dimaksud

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan PERKADA tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 184 mengatur ketentuan Penetapannya.</p> <p>q) Pasal 191 ayat (1) dan Ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam PERKADA yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.</p> <p>PERDA No. 5 Thn 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah amanat dari Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, amanat lain dalam PERMENDAGRI tersebut yakni Penetapan 3</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|---|--|--|---|--|
| | | | | <p>PERKADA meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 3) Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan 4) Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja. | | | | |
| 6 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 | 02 Mei 2025 | Berlaku | <p>Pada Pasal 6 ayat (7) PERDA ini, memuat perintah untuk menetapkan PERBUP sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> | <ol style="list-style-type: none"> a) Agar membentuk PERBUP tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun. b) Penyusunan rancangan awal RKPD, dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. c) Rancangan akhir RKP Daerah diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei dan menjadi bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | Sampai saat ini Perangkat Daerah yang membidangi selalu melaksanakan pebentukan PERBUP tentang RKP Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | SELESAI (Catatan; RKP Daerah Tahun 2025) |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | d) Untuk perubahan RKP Daerah, maka penyusunan rancangan perubahan RKP Daerah dimulai paling lambat pada awal bulan Juni pada tahun berjalan. | | | |
| Tahun 2024 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2024 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam | 30 Januari 2024 | Berlaku | Menetapkan PERBUP ttg Ttata cara pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam diatur dalam peraturan bupati. (Pasal 27 ayat 6) | a) Menetapkan PERBUP ttg Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam. b) Materi Pasal PERBUP dapat mengatur Teknis Pelaksanaan secara keseluruhan dari PERDA. c) Materi PERBUP dapat saling terkait dengan PERDA No. 4 Thn 2024 ttg Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam. | Dinas Perikanan (Inisiatif DPRD) | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan | 30 Januari 2024 | Berlaku | Menetapkan Beberapa PERBUP antara lain: a) PERBUP ttg pembentukan perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau sebutan lain yang sejenis | 1 Menetapkan) PERBUP yang mengatur paling sedikit ruang | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Telah Diajukan 2 RAPERBUP mengatur PEDOMAN TEKNIS dan BULAN LITERASI pada Tahun 2024, namun sampai saat ini tidak | BELUM PROSES /TIDAK ADA PENGAJUAN BARU |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat 3).</p> <p>b) PERBUP ttg Tata tertib perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 21 ayat 7).</p> <p>c) PERBUP ttg tata cara pelayanan Perpustakaan dengan Peraturan Bupati (Pasal 35 ayat 7).</p> <p>d) PERBUP ttg Ketentuan Hak Tenaga perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 38 ayat 2).</p> <p>e) PERBUP ttg bentuk kegiatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 41 ayat 3).</p> <p>f) PERBUP ttg tata cara pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian Naskah Kuno diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 45 ayat 3).</p> <p>g) PERBUP ttg Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi</p> | <p>lingkup sebagaimana dimaksud pada 5 perintah Pasal dalam PERDA.</p> <p>2 PERBUP) tersebut dapat digabung dalam 1 PERBUP yang mengatur Pedoman Teknis Penyelenggaraan Perpustakaan.</p> | | <p>pernah dilengkapi persyaratan sehingga tidak dapat dilanjutkan.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|--|---|---|---|--|
| | | | | terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 47 ayat 3). | | | | |
| 3 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah | 26 Januari 2024 | Berlaku | a) Ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib untuk dilakukan penyesuaian; b) Pengatur hasil penataan perangkat daerah berdasarkan hasil skoring ulang terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terjadi perubahan tipologi. | Menyesuaikan PERBUP yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan adanya perubahan kedua PERDA perangkat daerah dimaksud. | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | a) Peraturan Bupati No. 8 Thn 2024 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. b) PERBUP diatas mencabut sekitar 39 PERBUP Tupoksi dari PERDA awal/Perubahan Kesatu. | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 04 Januari 2024 | Berlaku | Dalam PERDA No. 1 Thn 2024, memuat ketentuan pengaturan teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 21 amanat Pasal yang dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi penggolongan pedoman teknis yakni Pajak dan Retribusi. | Menetapkan 2 PERBUP yang menjadi pedoman teknis dari seluruh muatan materi PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni: a) Tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati. dan b) Tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. | Badan Pendapatan Daerah | 1) Peraturan Bupati No. 1 Thn 2024 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa. 2) Peraturan Bupati No. 45 Thn 2024 ttg Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Peraturan Bupati No. 6 Thn 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah. 4) | SELESAI Catatan: agar pedoman teknis ini (PERBUP No. 6 Thn 2025 dan PERBUP 7 Thn 2025) tetap dievaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan di lapangan, dan dengan banyaknya muatan meteri jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk yang |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---|--|------|---|---|
| | | | | | | | Peraturan Bupati No. 45 Thn 2024 ttg Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5) Peraturan Bupati No. 7 Thn 2025 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah. | ada hubungan dengan pungutan Pajak oleh Pemerintah Provinsi) |
| 5 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Daerah | 30 Januari 2024 | Berlaku | Menetapkan Beberapa PERBUP antara lain: a) PERBUP ttg Rencana Umum Penanaman Modal (Pasal 6). b) PERBUP ttg pendelegasian kewenangan Bupati kepada kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan (Pasal 10 ayat 3 dan ayat 6). c) PERBUP ttg Manajemen penyelenggaraan Perizinan termasuk didalamnya memuat petunjuk teknis penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 21, Pasal 30 ayat 4, Pasal 31 ayat 4). | Menetapkan sekitar 5 PERBUP sebagaimana dimaksud dari hasil penelusuran Perda No. 6 Thn 2024 | DPRD | a) PERBUP No. 51 Thn 2024 ttg Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab PPU. b) PERBUP No. 52 Thn 2024 ttg Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab PPU. c) PERBUP No. 53 Thn 2024 ttg Pemberian | 1) SELESAI (2 Materi Pasal 10 dan Pasal 34). 2) BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN (3 Materi Raperbup lainnya yakni: amanat Pasal 6, Pasal 21, Pasal 30 ayat 4, Pasal 31 ayat 4) |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------|--|---------|
| | | | | <p>d) PERBUP ttg Petunjuk Teknis pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman Modal (Pasal 34).</p> <p>e) PERBUP ttg Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 39).</p> | | | Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. | |
| 6 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | 30 Desember 2024 | Berlaku | Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18) | Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Peraturan Bupati No. 57 Thn 2024 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | 13 Agustus 2024 | Tidak Punya Daya Guna | Bupati menetapkan peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 18). | Menetapkan PERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | PERBUP No. 29 Thn 2024 ttg Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2024. | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2024 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | 9 Agustus 2024 | Berlaku | Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal | Menetapkan PERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | PERBUP No. 28 Thn 2024 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. PPU TA 2023 | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---------|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | | 11) | | | | |
| 9 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2024 Tentang Pedoman Zona Nilai Tanah | 30 Januari 2024 | Berlaku | <p>a) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata Tanah, inventarisasi dan identifikasi Nilai Tanah, dan klasifikasi Zona Nilai Tanah diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 12).</p> <p>b) Mekanisme penanganan pengaduan dan keberatan terhadap pemanfaatan peta zona nilai tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 16).</p> | Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Penetapan Zona Nilai Tanah | DPRD | Pembentukan PERBUP tentang TATA CARA PEMBENTUKAN/ PENYEMPURNAAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDEKS RATA-RATA saat ini berada pada tahap FASILITASI GUBERNUR | PROSES (Fasilitasi Gubernur) |
| 10 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2024 Tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana | 30 Januari 2024 | Berlaku | <p>Menetapkan Beberapa PERBUP antara lain:</p> <p>a) PERBUP ttg Pembentukan unit operasional dan unit pelaksana di tingkat kecamatan dan desa diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 9).</p> <p>b) PERBUP ttg Perencanaan Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 14).</p> <p>c) PERBUP ttg Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan</p> | Menetapkan PERBUP yang memuat minimal 18 Materi Pasal yang dapat digabung dalam beberapa PERBUP yang sesuai ruang lingkup. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PERBUP No. 7 Thn 2024 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Bencana. | 1) SELESAI (hanya sebagian kecil materi Pasal 82, yang diatur mengenai pengelolaan dana dari APBD). 2) BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN (17 Materi Pasal dan teknis lainnya) |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>Bupati (Pasal 21 ayat 4).</p> <p>d) PERBUP ttg pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 23 ayat 4).</p> <p>e) PERBUP ttg Kemudahan akses saat saat Status Keadaan Darurat Bencan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 33).</p> <p>f) PERBUP ttg Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 38 ayat 5).</p> <p>g) PERBUP ttg sistem komando pengendalian lapangan status keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 43 ayat 5).</p> <p>h) PERBUP ttg pedoman penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal 45 ayat 4).</p> <p>i) PERBUP ttg Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan lembaga usaha diatur</p> | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | <p>dengan Peraturan Bupati (Pasal 47 ayat 3).</p> <p>j) PERBUP ttg Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 64 ayat 2).</p> <p>k) PERBUP ttg partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat pada rencana kegiatan Rekonstruksi tahap pasca bencana diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal 66 ayat 2).</p> <p>l) PERBUP ttg Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya pada kegiatan rekonstruksi pasca bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 67 ayat 2).</p> <p>m) PERBUP ttg penyelenggaraan Kawasan Rawan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 69 ayat 4).</p> <p>n) PERBUP ttg partisipasi masyarakat dalam penyediaan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat diatur dengan</p> | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Peraturan Bupati (Pasal 79).</p> <p>o) PERBUP ttg pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 82).</p> <p>p) PERBUP ttg pengelolaan barang penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 86).</p> <p>q) PERBUP ttg mekanisme peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 88 ayat 3).</p> <p>r) PERBUP ttg tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati (Pasal 95 ayat 3).</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tahun 2023 | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------|---|---------|
| 1 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 | 28 Desember 2023 | Tidak Punya Daya Guna | <p>a) Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18).</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p> | Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | PERBUP No. 36 Thn 2023 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024. | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 8 | 18 Oktober | Tidak Punya | a) Bupati menetapkan | Menetapkan Peraturan | Badan Keuangan | PERBUP No. 28 Thn 2023 | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | Thn 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Daya Guna | <p>peraturan tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 10).</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p> | Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2023. | dan Aset Daerah | ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. | |
| 3 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 21 Agustus 2023 | Tidak Punya Daya Guna | <p>a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11).</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p> | Menetapkan PERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | PERBUP No. 20 Thn 2023 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022. | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2023 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah | 18 April 2023 | Berlaku | a) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan | Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERDA yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 47 dan materi Pasal lainnya sebagai bentuk | Dinas Komunikasi dan Informatika (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|---|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | <p>saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk dapat diakses oleh setiap orang diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20).</p> <p>b) Standar layanan informasi publik yang antara lain memuat Tata cara memperoleh Informasi Publik ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 22).</p> <p>c) Tata Cara pengajuan keberatan (Sengketa Informasi) secara tertulis kepada atasan PPID diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 47).</p> | penjabaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. | | | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas | 18 April 2023 | Berlaku | <p>PERDA mengamanatkan untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain:</p> <p>a) PERBUP yang Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat (4)).</p> <p>b) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi penyiapan data terkait Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan</p> | <p>Menetapkan 2 PERBUP, yakni:</p> <p>1 PERBUP) yang mengatur khusus Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas.</p> <p>2 PERBUP) gabungan dari seluruh amanat</p> | Dinas Sosial (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>Bupati (Pasal 5).</p> <p>c) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kelas Terpadu atau Inklusi dan SLB diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20).</p> <p>d) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 27).</p> <p>e) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/ atau masyarakat kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/ atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 28).</p> <p>f) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga</p> | <p>Pasal dan Pasal lainnya perlu penjelasan teknis yang tertuang dalam PERDA sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas.</p> <p>Pada angka 2) diatas tetap mengatur tata cara dan mekanisme penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas, sementara khusus angka 1) yang</p> | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 42).</p> <p>g) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 45).</p> <p>h) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 52).</p> <p>i) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara penzinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya Habilidadasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, harus membebaskan biaya Habilidadasi dan Rehabilitasi. diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 63).</p> <p>j) PERBUP ttg Ketentuan</p> | <p>ditetapkan hanya RENCANA AKSI DAERAH.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

lebih lanjut mengenai
Habilitasi dan Rehabilitasi
sosial bagi Penyandang
Disabilitas diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal
67).

k) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian bantuan
sosial Penyandang
Disabilitas diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal
68 ayat 7).

l) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian
penghargaan dalam
mewujudkan perlindungan
dan pelayanan bagi
Penyandang Disabilitas
diatur dalam Peraturan
Bupati (Pasal 74).

m) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara penyelenggaraan
pembinaan dan
pengawasan terhadap
Pelindungan dan
Pelayanan foagi
Penyandang Disabilitas
diatur dalam Peraturan
Bupati (Pasal 77 ayat 2).

n) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|---|---|---|--|---------|
| | | | | Peraturan Bupati (Pasal 81). o) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 85 ayat 3 dan ayat 4). | | | | |
| 6 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2023 Tentang Dukungan Dan Fasilitas Bagi Pondok Pesantren | 18 April 2023 | Berlaku | PERDA mengamanatkan untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain mengatur: a) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 11). b) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitas bagi Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 15). c) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan Dukungan dan fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati | Menetapkan PERBUP yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERDA yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta materi Pasal lainnya sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Dukungan Dan Fasilitas Bagi Pondok Pesantren. | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD) | PERBUP No. 32 Thn 2024 ttg Pedoman Pelaksanaan Dukungan Dan Fasilitas Bagi Pondok Pesantren. | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | | <p>(Pasal 16).</p> <p>d) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi dakwah Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 17).</p> <p>e) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18).</p> <p>f) Ketentuan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi terhadap dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan bagi Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 21).</p> | | | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2023 Tentang Badan Permusyawaratan Desa | 18 April 2023 | Berlaku | Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun | Melakukan penyesuaian Pedoman Teknis BPD yang menggantikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dan Peraturan Bupati Penajam Paser | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pedoman teknis ditetapkan Penetapan Perda ini, harus segera disesuaikan. Adapun amanat dalam PERDA yakni:</p> <p>PERDA mengamanatkan untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 3).b) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 9).c) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian cuti diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 11).d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan calon anggota BPD diatur dengan Peraturan bupati (Pasal 12).e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 13). | <p>Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 16).</p> <p>g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pemberhentian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 18).</p> <p>h) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian BPD antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 19).</p> <p>i) ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 27).</p> <p>j) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional kegiatan BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 28).</p> <p>k) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya bagi Anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 29).</p> <p>l) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | <p>Ketenagakerjaan, Pembayaran dan pembebanan iuran jaminan sosial mengacu pada Peraturan Bupati (Pasal 30).</p> <p>m) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan n atas prestasi pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 35).</p> | | | | |
| 8 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah | 11 April 2023 | Berlaku | <p>Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah mengamanatkan:</p> <p>a) Pasal 15 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b) Pasal 16 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal 20 ayat (3) Pedoman mengenai kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> | Perlu segera menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis PUG, yang menggantikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah dalam PROPEMPERBUP Thn 2025. | BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | d) Pasal 20 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif (kepada PD yang tidak melaksanakan PUG) diatur dalam Peraturan Bupati. | | | | |
| 9 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan | 11 April 2023 | Berlaku | <p>a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Pasal 5 dan Pasal 6, diatur Pembentukan dan Tata Cara Pelayanan UPTD PPA dengan Peraturan Bupati, dan Pasal 15 ayat (3) tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b) b) PERDA ini menggantikan PERDA PERDA No. 5 Thn 2014 ttg Perlindungan Perempuan Dan Anak yang mengatur materi muatan terkait Perlindungan Perempuan.</p> | <p>a) Menetapkan PERBUP mengenai Pembentukan dan Tata Cara Pelayanan UPTD PPA.</p> <p>b) Materi PERBUP dapat juga memuat materi detail tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan.</p> | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara | SELESAI (Catatan: karena tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu merupakan amanat langsung dari PERDA, seyogyanya dapat dilakukan evaluasi apakah SPM harus selalu mengacu pada Peraturan Menteri masih relevan). |
| Tahun 2022 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2022 Tentang Rencana Pembangunan | 21 September 2022 | Tidak Punya Daya Guna | Perlu menetapkan: Perbup Tata Cara Evaluasi dan Pemantauan | Menetapkan: Perbup Tata Cara Evaluasi dan Pemantauan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA |

| | Industri Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024 | | | RPIK/Pedoman Pelaksanaan (Pasal 9) | RPIK/Pedoman Pelaksanaan | Perdagangan | | PENGAJUAN |
|---|---|-------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 2 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 | 18 Oktober 2022 | Tidak Punya Daya Guna | a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 10). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | Menetapkan Pejabaran Perubahan APBD TA 2022. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Perbup 32 Thn 2022 ttg Pejabaran Perubahan APBD TA 2022 | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 21 September 2022 | Tidak Punya Daya Guna | a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | Menetapkan Perbup ttg Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Perbup 2 Thn 2022 ttg Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim Anak Piatu Dan | 20 Juli 2022 | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengordinir Pelaksanaan | Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan | Dinas Sosial (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|--|---|---|--|--------------------------------------|
| | Anak Yatim Piatu | | | Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim Anak Piatu Dan Anak Yatim Piatu | | | | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2022 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah | 20 Juli 2022 | Berlaku | <p>a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 28 ayat (3), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (6), Pasal 25 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan.</p> <p>b) Sebelum Perda ini ditetapkan telah diatur PERBUP No. 19 Thn 2016 ttg Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> | Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang akan menggantikan PERBUP No. 19 Thn 2016 ttg Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. | Satuan Polisi Pamong Praja | Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Rencana Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam PROPEMBERBUP Thn 2025. | BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP |
| 6 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2022 Tentang Sistem Perlindungan Anak | 20 Juli 2022 | Berlaku | a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 Ayat (9), Pasal 7 Ayat (5), Pasal 8 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (6), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup | Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | <p>sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan.</p> <p>b) PERDA ini menggantikan PERDA PERDA No. 5 Thn 2014 ttg Perlindungan Perempuan Dan Anak yang mengatur materi muatan terkait Anak.</p> | | | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2027 | 20 Juli 2022 | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (4) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pemberian Insentif dan disinsentif Pembangunan Fasilitas Kepariwisata | Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pemberian Insentif dan disinsentif Pembangunan Fasilitas Kepariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |
| 8 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun | 20 Juli 2022 | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 22 ayat (3), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pengaturan Dokumen Perencanaan Limbah B3 | Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pengaturan Dokumen Perencanaan Limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |
| 9 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2022 Tentang Paguyuban Suku Dan Budaya | 20 Juli 2022 | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya Pusa Paguyuban dan Pembinaan Paguyuban | Perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya Pusa Paguyuban dan Pembinaan Paguyuban Suku dan Budaya | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------|---|--|--|--|---------|
| | | | | Suku dan Budaya | | | | |
| 10 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | 20 Juli 2022 | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (2) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan | Perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Perbup 14 Thn 2023 ttg Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 | 25 Januari 2022 | Tidak Punya Daya Guna | a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Bupati Menetapkan Perkada Penjabaran APBD. b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah | PERBUP No. 3 Thn 2022 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022. | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 | 25 Januari 2022 | Tidak Punya Daya Guna | a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Bupati Menetapkan Perkada Penjabaran Perubahan APBD. b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Perbup 29 Thn 2022 ttg Pejabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2021. | SELESAI |
| 13 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 | 22 Desember 2022 | Tidak Punya Daya Guna | a) Perlu menetapkan PERBUP Penjabaran APBD TA.2023 (Pasal 18). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun | Menetapkan Perbup ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022. | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | PERBUP No. 3 Thn 2022 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022. | SELESAI |

| pelaksanaan kegiatan. | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------|--|--|---|---|---|
| Tahun 2021 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2021 Tentang Pengelolaan Sampah | 21 Juni 2021 | Berlaku | Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan) sesuai Pasal 10 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (4), Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 56; | Menyusun Perbup yang mengatur Pedoman/Teknis Pelaksanaan dari Peraturan Derah. | Dinas Lingkungan Hidup | PERBUP No. 47 Thn 2024 ttg Pengumpulan Sampah. | a) SELESAI (Khusus materi materi PERDA pada Pasal 24 ayat (5) terkait Pengumpulan Sampah); b) BELUM PROSES (untuk 19 Materi Pasal yang mengamanatkan pengaturan dalam PERBUP) |
| 2 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak | 22 Juni 2021 | Berlaku | Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan) sesuai Pasal 32 ayat (2) | Menyusun Pedoman Pelaksanaan Peraturan Derah | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam PROPEMBERBUP Thn 2025. | BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP |
| 3 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2021 Tentang Pengembangan Ekowisata | 22 Juni 2021 | Berlaku | Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan) sesuai Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5) | Menyusun Pedoman Pelaksanaan Peraturan Derah | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Inisiatif DPRD) | Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum. | BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN |
| 4 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum | 22 Juni 2021 | Berlaku | 1) Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan | a) Menetapkan Perbup sebagai Pedoman teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum. | Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD) | 1) Perbup No. 12 Thn 2023_Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 2. Dalam DPA sudah terangkan | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|---|---------|
| | | | | <p>Pelaksanaan) sesuai Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3);</p> <p>2) Mengatur Kewajiban Pemerintah Daerah menganggarkan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD.</p> | <p>b) Pemerintah Daerah menganggarkan Anggaran Bantuan Hukum setiap Tahun dalam APBD.</p> <p>c) Menuangkan Standar Bantuan Hukum dalam Perbup yang mengatur Standar Satuan Harga Daerah.</p> | | <p>Anggaran Bantuan Hukum. 3) Standar Satuan Harga Daerah sudah memuat Standar Bantuan Hukum.</p> | |
| Tahun 2020 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 | 30 Desember 2020 | Tidak Punya Daya Guna | <p>a) Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 18).</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p> | Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Perbup 55 Thn 2020 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021. | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--|--|---|---|--------------|
| 2 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka | 21 Desember 2020 | Berlaku | Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam Lampiran disebutkan bahwa: a) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan. b) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. c) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. | Menetapkan PERBUP ttg Pengelolaan penyertaan modal daerah. | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah/BKAD | Rancangan PERBUP ttg Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang masih penyempurnaan bersama BKAD/Bagian Perekonomian Setkab. | DALAM PROSES |
| 3 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi | 21 Desember 2020 | Berlaku | Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam Lampiran disebutkan bahwa: a) Pengelolaan penyertaan | Menetapkan PERBUP ttg Pengelolaan penyertaan modal daerah. | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | Rancangan PERBUP ttg Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang masih penyempurnaan bersama BKAD/Bagian Perekonomian Setkab. | DALAM PROSES |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|--|---------|
| | | | | <p>modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.</p> <p>b) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.</p> <p>c) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.</p> | | | | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 | 15 Oktober 2020 | Tidak Punya Daya Guna | <p>a) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 6).</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p> | Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1) Perbup 42 Thn 2020 ttg Pejabaran APBD TA 2020; 2) Perbup 51 Thn 2020_(Perubahan I Penjabaran APBD TA 2020) 3) Perbup 52 Thn 2020_(Perubahan II Penjabaran APBD TA 2020) | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2020 Tentang Pertanggungjawaban | 21 September 2020 | Tidak Punya Daya Guna | a) Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun | Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Pertanggungjawaban | Badan Keuangan dan Aset Daerah | Perbup 40 Thn 2020 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|--|---|--|--|---------|
| | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 | | | 2019 ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Pasal 12). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. | | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 | |
| 6 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2020 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka | 14 April 2020 | Berlaku | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan pada Pembentukan Peraturan Bupati dalam 8 muatan Pasal yakni Pasal 4, Pasal 13 ayat (3), Pasal 27 Ayat (6), Pasal 42 ayat (4), Pasal 54 ayat (6), Pasal 58 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (2). | Melakukan penyesuaian regulasi PERKADA yang telah ada sebelumnya berdasarkan PERDA ini dan Peraturan Menteri terkait. | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | 1) PERBUP No. 29 Thn 2020 ttg Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Danum Taka. 2) PERBUP No. 39 Thn 2020 ttg Penghasilan KPM, Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka. 3) PERBUP No. 20 Thn 2021 ttg Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2019-2023. 4) PERBUP No. 35 Thn 2021 ttg Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka. 5) PERBUP No. 40 Thn 2021 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Untuk Membangun | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | <p>Kerjasama Pengelolaan Jaringan Gas Dengan Badan Usaha Pengelolaan Jaringan Gas. 6) PERBUP No. 45 Thn 2022 ttg Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka. (PERBUP ini mencabut PERBUP PERBUP No. 29 Thn 2020). 7) PERBUP No. 27 Thn 2024 ttg Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.</p> | |
| 7 | <p>Peraturan Daerah No. 2 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka</p> | <p>30 Januari 2020</p> | <p>Berlaku</p> | <p>Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanaan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan.</p> | <p>Menyusun secara komprehensif regulasi turunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Perumda Benuo Taka</p> | <p>Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah</p> | <p>1) PERBUP No. 38 Thn 2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No. 28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. 3) PERBUP No. 22 Thn 2024 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Persiapan,</p> | <p>SELESAI (Catatan: Mengavaluasi Regulasi Secara Komprehensif yang dibutuhkan dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah)</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|---|---|---|---|---------|
| | | | | | | | Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara. | |
| 8 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah | 21 Januari 2020 | Berlaku | <p>a) Penetapan PERDA ini merupakan bagian dari evaluasi Perangkat Daerah evaluasi kinerja Organisasi PERANGKAT DAERAH sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan dalam Pemerintah Kabupaten;.</p> <p>b) Agar evaluasi kinerja Organisasi PERANGKAT DAERAH sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan tugas dan tanggungjawab menjadi berada di Bagian ORTALA Sekretariat Daerah</p> | <p>a) Pemerintah Daerah tetap melakukan evaluasi terhadap Organisasi PERANGKAT DAERAH secara berkala untuk memaksimalkan kinerja agar pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>b) Melakukan penyesuaian penjabaran PERDA melalui penyempurnaan regulasi turunannya.</p> | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | <p>1) PERBUP No. 10 Thn 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2) PERBUP No. 11 Thn 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 3) PERBUP No. 23 Thn 2021 ttg Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku. 4) PERBUP No. 7 Thn 2023 ttg Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk</p> | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|---|--|--|--|-----------|
| | | | | | | | Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. 5) PERBUP No. 3 Thn 2024 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. | |
| Tahun 2019 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 20 Thn 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 | 27 Desember 2019 | Tidak Punya Daya Guna | a) Berdasarkan PERDA ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 9). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020. | Badan Keuangan | PERBUP No. 38 Thn 2019 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020. | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 19 Thn 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara | 11 Desember 2019 | Berlaku | Belum Ada Pedoman Teknis Tata Cara Penyertaan Modal Daerah | Agar segera menyusun Raperbup Pedoman Teknis | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | BELUM ADA |
| 3 | Peraturan Daerah No. 18 | 21 Agustus | Tidak Punya | a) Bupati menetapkan | Menetapkan PERBUP ttg | Badan Keuangan | PERBUP No. 20 Thn 2019 | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|---|---------------------------------|--|---------|
| | Thn 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 | 2019 | Daya Guna | Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 6). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019. | | ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019. | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 17 Thn 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 | 21 Agustus 2019 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan | PERBUP No. 19 Thn 2019 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---------|
| | Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek | | dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | |
| 8 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--------------------------------|---|--|---|---------|
| | 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan | | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | | |
| 13 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pendapatan Derah | - | SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pendapatan Derah | - | SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pendapatan Derah | - | SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 07 Mei 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | Thn 2024 | | | | | |
| 18 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi | 29 April 2019 | Berlaku | Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanaan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan. | Menyusun secara komprehensif regulasi turunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Perumda Benuo Taka Energi | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | 1) PERBUP No. 38 Thn 2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No. 28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. | SELESAI (Catatan: Mengavaluasi Regulasi Secara Komprehensif yang dibutuhkan dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah) |
| 19 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 29 April 2019 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Perhubungan | - | SELESAI |
| 20 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 | 18 Maret 2019 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | - | SELESAI |
| Tahun 2018 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 | 21 Desember 2018 | Tidak Punya Daya Guna | a) Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan | - | Badan Keuangan | PERBUP No. 44 Thn 2018 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------|
| | | | | APBD (Pasal 6) b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | | | |
| 2 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 | 08 November 2018 | Tidak Punya Daya Guna | a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 12). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan | PERBUP No. 33 Thn 2018 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan | 10 September 2018 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan hanya menguatkan beberapa muatan Materi Pasal, amanat pembentukan PERBUP melengkapi PERBUP 12 Thn 2010, dengan muatan 15 Pasal yang mengatur ketentuan Pembentukan PERBUP. | a) Perlu menetapkan PERBUP yang mengatur pertunjuk pelaksanaan PERDA, walaupun ada beberapa PERBUP yang diterbitkan tetapi sebagian besar amanat PERDA menjadi muatan dalam pengaturan PERBUP. b) PERDA ini secara umum disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | a) PERBUP No. 32 Thn 2018 ttg Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah. b) PERBUP No. 16 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. (Mencabut PERBUP No. 18 Thn 2012). c) PERBUP No. 19 Thn 2020 ttg Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. d) PERBUP No. 54 Thn | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|--|---|----------------|---|---|
| | | | | | <p>Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU ini masih berlaku, namun demikian perlu dilakukan evaluasi terkait regulasi baru sebagai penjabaran UU Sisdiknas tersebut.</p> <p>c) Berdasarkan hal tersebut diatas sangat terbuka untuk dilakukan Penyempurnaan PERDA atau Pembentukan PERDA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p> | | 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 28 Agustus 2018 | Berlaku | <p>a) Dalam PERDA ini, sekitar 18 Pasal yang mengatur pembentukan PERBUP.</p> <p>b) Seiring dengan terbitnya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) yang menjadi Dasar Hukum utama pembentukan Peraturan Daerah ini, sehingga ada beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan.</p> <p>c) PP 24 Tahun 2014 Pasal</p> | <p>a) Melakukan Perubahan PERDA sesuai dengan PP dan PERMENDAGRI.</p> <p>b) Beberapa PERBUP Pelaksanaan dapat didahulukan Penyesuaiannya dengan aturan terbaru di atas.</p> | Badan Keuangan | <p>a) PERBUP No. 41 Thn 2024 ttg Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah. b) PERBUP No. 48 Thn 2020 ttg Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. c) PERBUP ttg Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun. d) Sebagian besar materi muatan Pasal dalam PERDA belum dibuat PERBUP</p> | <p>BELUM SELESAI (Catatan: Masih banyak materi muatan PERDA yang belum dibuatkan PERBUP sebagai teknis Pelaksanaan PERDA)</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|--|---|--|--|---|
| | | | | 105: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. | | | sebagai teknis pelaksanaan. | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan | 28 Agustus 2018 | Berlaku | <p>PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP dalam 3 muatan Pasal yakni:</p> <p>a) pada Pasal 12 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan rincian kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b) Pasal 15 ayat (3) bahwa Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal 16 ayat (4) bahwa Tatacara penyusunan data kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>a) Segera membuat PERBUP sebagai Pelaksanaan PERDA khususnya pada perintah Pasal 12, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4).</p> <p>b) Pembentukan PERBUP berdasarkan PERDA dapat disusun dalam beberapa PERBUP sesuai kebutuhan dan kemudahan dalam penerapan di Daerah.</p> | Dinas Sosial | Dalam PROPEMPERBUP Thn 2025 telah tertuang judul Rancangan PERBUP ttg Data Cara Pemutakhiran Data Warga di Daerah/ Indikator Kemiskinan. | BELUM PROSES (Catatan: Dokumen Tidak Lengkap) |
| 6 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah | 28 Agustus 2018 | Berlaku | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana | Perlu menyusun PERBUP ttg tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah | Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD) | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|--|---|-------------------|---|---------|
| | | | | dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | | | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Kesehatan | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Keuangan | - | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | RSUD | - | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Perhubungan | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2018 Tentang Retribusi Tempat Khusus | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Perhubungan | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|--|---|--|--|--|-----------|
| | Parkir | | dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | | |
| 12 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | SELESAI |
| 13 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar | 08 Juni 2018 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | - | SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum | 25 April 2018 | Berlaku | Belum Ada Pedoman Teknis Tata Cara Penyertaan Modal Daerah | Agar segera menyusun Raperbup Pedoman Teknis | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | BELUM ADA |
| Tahun 2017 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 21 Thn 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 | 29 Desember 2017 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 20 Thn 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten | 22 November 2017 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan | PERBUP No. 64 Thn 2017 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam | SELESAI |

| | Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 | | | | | | Paser Utara Tahun Anggaran 2017. | |
|---|---|------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| 3 | Peraturan Daerah No. 19 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 | 21 November 2017 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 18 Thn 2017 Tentang Izin Membuka Tanah Negara | 21 November 2017 | Berlaku | Dalam PERDA mengamankan Pembentukan PERBUP dengan perintah 3 materi Pasal. | Perlu menetapkan PERBUP sebagai pedoman pelaksanaan. | Bagian Pemerintahan (Inisiatif DPRD) | - | BELUM SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 17 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara | 21 November 2017 | Berlaku | a) PERDA ini mengamankan Pembentukan PERBUP yang mengatur pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung Walet di Daerah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b) Kebutuhan atas keberadaan PERBUP diatas, karena dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, | Menetapkan PERBUP sebagai pelaksanaan PERDA. | Dinas Peternakan | BELUM ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | Pemegang izin (Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet) diwajibkan terdaftar sebagai anggota asosiasi perusahaan sarang burung Walet di Daerah. | | | | |
| 6 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2017 Tentang Pinjaman Daerah Pada Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur | 21 November 2017 | Berlaku | - | - | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2017 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan | 21 November 2017 | Berlaku | PERDA mengamanatkan pada: Pasal 9 ayat (2) bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pemberian nama Jalan dan perubahan nama Jalan diatur dengan Peraturan Bupati. | Agar menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Teknis Pemberian Nama Jalan | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2017 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah | 21 November 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP pada: Pasal 5 ayat (3) Ketentuan mengenai perencanaan, proses pendaftaran, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, persyaratan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. | Agar menetapkan PERBUP yang mengatur Pertunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan menyesuaikan program nasional di bidang kesehatan. | Dinas Kesehatan | PERBUP No. 18 Thn 2019 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah. | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan | 21 November 2017 | Berlaku | Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanan (Peraturan Perusahaan | Menyusun secara komprehensif regulasi turunan dalam rangka | Bagian Perekonomian Sekretariat | 1) PERBUP No. 38 Thn 2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa | SELESAI (Catatan: Mengavaluasi |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---------|---|---|---------------------------------|---|---|
| | Umum Daerah Benuo Taka | | | dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan. | pelaksanaan tugas dan wewenang Perumda Benuo Taka Energi | Daerah | Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No. 28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. 3) PERBUP No. 22 Thn 2024 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara. | Regulasi Secara Komprehensif yang dibutuhkan dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah) |
| 10 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2017 Tentang Penyelenggaraan Agribisnis Dan Agroindustri | 21 November 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan dengan 5 Pasal untuk membentuk PERBUP pada: Pasal 33, Pasal 43 ayat (4), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 57. | Agar Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Agribisnis Dan Agroindustri. | Dinas Pertanian (Inisatif DPRD) | BELUM ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2017 Tentang Kepelabuhanan | 21 November 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP sebagai pedoman teknis PERDA pada: a) Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan (di Pelabuhan) diatur dengan Peraturan Bupati. | Agar dapat membentuk PERBUP yang mngatur Pedoman teknis PERDA. | Dinas Perhubungan | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------|--|---|-----------------------------------|---|---------------|
| | | | | <p>b) Pasal 9: pedoman tata cara penetapan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal ayat (4) dan ayat (5): Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dsan Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>d) Pasal 13: Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>e) Pembentukan Dewan Kelautan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati (bersifat pilihan).</p> | | | | |
| 12 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan | 21 November 2017 | Berlaku | a) PERDA No. 10 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor | a) Menyarankan untuk melakukan evaluasi Materi PERDA apakah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---------|--|---|--|------------------------------|---------------|
| | Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | | | 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, memuat 10 Pasal yang memerintahkan pembentukan PERBUP termasuk yang ada dalam PERDA awal. c) Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. | ada yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, b) Menyarankan membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA. | Sipil | | |
| 13 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara | 21 November 2017 | Berlaku | PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2017. | - | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2017 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal | 01 November 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanat Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), | Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Inisiatif DPRD) | TIDAK ADA PENGAJUAN RAPERBUP | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|---------|---|--|----------------|---|---------|
| | | | | Pasal 32 ayat (8), Pasal 33 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (3). | | | | |
| 15 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 12 Oktober 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanat Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3). | Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA. | Badan Keuangan | a) PERBUP No. 12 Thn 2024 ttg Perubahan Ketiga Atas PERBUP No. 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. b) PERBUP No. 36 Thn 2021 ttg Perubahan Kedua Atas PERBUP No. 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. c) PERBUP No. 4 Thn 2018 ttg Perubahan Atas PERBUP No. 61 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. d) PERBUP No. 61 Thn 2017 ttg Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-----------------------|---|--|--|--|---------------|
| 16 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum | 14 September 2017 | Berlaku | PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2017. | - | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 | 11 September 2017 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Keuangan | - | SELESAI |
| 18 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2017 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah | 29 Agustus 2017 | Berlaku | PERDA mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 31, Pasal 39 ayat (4), Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 49. | Agar menetapkan PERBUP sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan PERDA. | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | a) PERBUP No. 1 Thn 2025 ttg Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara. b) Materi dalam PERBUP diatas hanya sebagaian kecil dari pelaksanaan PERDA, terkait dengan teknis pelaksanaan sesuai amanat PERDA tidak diatur. | BELUM SELESAI |
| 19 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan | 29 Agustus 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (3) | Menetapkan PERBUP yang mengatur Pelaksanaan PERDA. | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | a) PERBUP No. 16 Thn 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PengeiOlaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------------|---|---|--|--|---------|
| | | | | | | | Perusahaan.(Berlaku) b) PERBUP No. 15 Thn 2020 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.(Tidak Berlaku-dicabut dengan PERBUP No. 16 Thn 2023) | |
| 20 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2017 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Adat Paser | 29 Agustus 2017 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP terhadap Kegiatan Pelestarian berupa Hasil Inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan(Pasal 2 ayat 2 huruf a, ayat 3 dan ayat 4). | a) Membentuk PERBUP terhadap Hasil Inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan. b) Pembentukan PERBUP dilaksanakan apabila ada usulan dari Lembaga Adat Paser. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Inisiatif DPRD) | - | SELESAI |
| 21 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 | 07 Februari 2017 | Tidak Punya Daya Guna | a) Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 6). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun | - | Badan Keuangan | a) PERBUP No. 3 Thn 2017 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017. b) PERBUP No. 8 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----------------------|--|---|---|---|---------|
| | | | | pelaksanaan kegiatan. | | | Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. | |
| Tahun 2016 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah | 15 Desember 2016 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan PERBUP yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 4). | Menerbitkan PERBUP yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sebagai pelaksanaan PERDA. | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setretariat Daerah | a) PERBUP No. 22 Thn 2017 sampai dengan PERBUP No. 54 Thn 2027 (33 PERBUP). b)PERBUP No. 36 Thn 2019 (mengubah PERBUP 22 Thn 2017); | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 | 05 Desember 2016 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 | 29 November 2016 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2015 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam | 31 Desember 2015 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|--|--|---|--|---|
| | Paser Utara Tahun Anggaran 2016 | | | | | | | |
| 2 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 | 02 Desember 2015 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 | 11 November 2015 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2015 Tentang Bangunan Gedung | 14 September 2015 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP sebagai teknis pelaksanaan PERDA sekitar 46 Pasal, | Agar menetapkan PERBUP sebagai pedoman teknis pelaksanaan PERDA | Dinas Pekerjaan Umum | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Penajam Paser Utara | 02 September 2015 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok | 02 September 2015 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur tentang Uraian Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). | Membentuk PETBUP tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok | Dinas Kesehatan | - | BELUM SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 Tentang Desa | 02 September 2015 | Berlaku | Dalam PERDA ini ada beberapa pengaturan pembentukan PERBUP, yang muatan materinya merupakan bersifat pedoman teknis PERDA yakni: | a) Menetapkan PERBUP sebagai pedoman teknis, baik dalam beberapa PERBUP. b) Muatan materinya berdasarkan amanat | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | a) PERBUP No. 14 Thn 2024 ttg Pengangkatan Dan Honorarium Staf Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa; b) PERBUP No. 13 Thn 2024 | a) SELESAI (Juknis PERBUP) b) BELUM SELESAI (Untuk penyesuaian dengan UU No. 3 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | <p>a) Pasal 20 ayat (4): Kriteria dan tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Pasal 27 ayat (5): Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Pasal 40: Bentuk dan sistematika laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>d) Pasal 47: Tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>e) Pasal 80: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain</p> | <p>Pasal dalam PERDA dapat digabung sesuai dengan materi yang dapat disatukan atau dipisah apabila bentuk PERBUP yang terpisah tersebut lebih sesuai.</p> <p>c) Melakukan Penyempurnaan PERDA sehubungan dengan ada UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta banyak PERMENDAGRI yang terbit yang mengatur desa sehingga perlu segera disesuaikan.</p> | <p>ttg Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; c) PERBUP No. 1 Thn 2024 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa; d) PERBUP No. 35 Thn 2023 ttg Petunjuk Teknis Transaksi Nontunai Penerimaan Dan Pengeluaran Desa; f) PERBUP No. 22 Thn 2022 ttg Pengelolaan Aset Desa; g) PERBUP No. 15 Thn 2022 ttg Pedoman Teknis Pengangkatan Pemberhentian Dan Cuti Perangkat Desa; i) PERBUP No. 39 Thn 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa; l) PERBUP No. 8 Thn 2021 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PERBUP No. 13 Thn 2023; n) PERBUP No. 33 Thn 2020 ttg Tata Cara Pelaksanaan</p> | <p>Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta banyak PERMENDAGRI yang terbit yang mengatur desa sehingga perlu segera disesuaikan).</p> |
|--|--|--|---|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. | | | Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; o) PERBUP No. 9 Thn 2020 ttg Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa; p) PERBUP No. 4 Thn 2020 ttg Insentif Rukun Tetangga Desa/Kelurahan; q) PERBUP No. 2 Thn 2020 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan Perdesaan Mandiri; r) PERBUP No. 35 Thn 2019 ttg Pedoman Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Desa; s) PERBUP No. 30 Thn 2019 ttg Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 34 Thn 2020; t) PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021; u) PERBUP No. 4 Thn 2019 ttg Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; p) |
| | | | f) Pasal 90 ayat (4): Tata cara penetapan calon Kepala Desa terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati. | | | |
| | | | g) Pasal 95: Tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri. | | | |
| | | | h) Pasal 108: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri. | | | |
| | | | i) Pasal 109 ayat (2): Tata cara mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri. | | | |
| | | | j) Pasal 121 ayat (7) Tata | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>k) Pasal 125: Pengaturan lebih lanjut mengenai tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>l) Pasal 127 ayat (5): Tata cara mengenai tata tertib dan pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>l) Pasal 129: Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>m) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>n) Pasal 139 : Pasal Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan</p> | | | <p>PERBUP No. 19 Thn 2018 ttg Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa; w) PERBUP No. 2 Thn 2018 ttg Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; x) PERBUP No. 55 Thn 2017 ttg Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa; dan y) PERBUP No. 15 Thn 2017 ttg Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 32 Thn 2021.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>o) Pasal 140 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>p) Pasal 147 : Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>q) Pasal 148 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>r) Pasal 149 ayat (2) : Tata cara pembentukan lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>s) Pasal 157: Lembaga kemasyarakatan Desa yang sudah ada masih tetap melaksanakan tugas</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|--|---|--|---|---------|
| | | | | <p>dan fungsinya sampai ditetapkannya lembaga kemasyarakatan Desa yang baru berdasarkan peraturan t)Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>t) Pengaturan Desa Persiapan dalam bentuk Peraturan Buapti juga ada, sepanjang ada pengusulan pembentukan.</p> | | | | |
| Tahun 2014 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 | 31 Desember 2014 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur | 31 Desember 2014 | Berlaku | PERDA mengamankan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2015. | - | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 | 04 Desember 2014 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 10 | 24 | Tidak Punya | PERDA ini tidak mempunyai | - | Bagian | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|---|---|---------|
| | Thn 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 | November 2014 | Daya Guna | daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | Keuangan Sekretariat Daerah | | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 September 2014 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 September 2014 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Bupati No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 September 2014 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor | 29 September 2014 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | | | Daerah | | |
| 9 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak | 29 September 2014 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini sudah tidak memiliki daya guna sejak terbitnya: a) PERDA No. 7 Thn 2022 ttg Sistem Perlindungan Anak; b) PERDA No. 1 Thn 2023 ttg Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. | - | Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | - | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 | 02 September 2014 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencana Pembangunan Daerah | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 | 01 Juli 2014 | Berlaku | a) PERDA ini mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033. b) Saat ini dilakukan revisi terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. | PERDA ini seyogyanya dijabarkan dalam PERBUP yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). | Dinas Pekerjaan Umum | a) SAAT INI dilakukan proses pembentukan PERBUP RDTR untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Serambi Nusantara Koridor Maridan-Riko- Sepan-Sotek dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Serambi Nusantara Koridor Penajam-Petung. | SEBAGIAN SELESAI (Catatan: RDTR yang lain masih akan diajukan) |
| 12 | Peraturan Daerah No. 2 | 03 Februari | Tidak Punya | PERDA ini tidak mempunyai | - | Bagian | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|---|---|---|---|---------|
| | Thn 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 | 2014 | Daya Guna | daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | Keuangan Sekretariat Daerah | | |
| 13 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan | 27 Januari 2014 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2013 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 deee | 18 November 2013 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 | 15 November 2013 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja | 07 November 2013 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|---|--|---|---------|
| | Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | | | | | | | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2013 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah | 12 September 2013 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan untuk membuat PERBUP sebagai teknis pelaksanaan pada: a) Pasal 35 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan diatur dalam Peraturan Bupati. b) Pasal 37 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Sekretariat Majelis Pertimbangan diatur dalam Peraturan Bupati. | Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan PERDA. | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | a) PERBUP No. 47 Thn 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah. b) PERBUP No. 24 Thn 2020 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah. | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara | 12 September 2013 | Berlaku | PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2013. | - | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar | 17 Juni 2013 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | Thn 2024 | | | | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 17 Juni 2013 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan | 17 Juni 2013 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2012 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 25 Thn 2012 Tentang Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 28 Desember 2012 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | - | BELUM SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 24 Thn 2012 Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove | 28 Desember 2012 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis Pengelolaan Hutan Mangrove pada Pasal 5, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 28. | Menerbitkan PERBUP yang mengatur Pedoman teknis Pengelolaan Hutan Mangrove . | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 23 Thn 2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran | 28 Desember 2012 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis Pendidikan Baca Tulis Al-Quran pada Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2). | Menerbitkan PERBUP yang mengatur Pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Quran. | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | PERBUP No. 9 Thn 2023 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Quran Di Daerah. | SELESAI (Catatan: agar materi diatur dievaluasi, apakah telah mengakomodir seluruh amanat Pasal dalam PERDA) |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------|
| 4 | Peraturan Daerah No. 22 Thn 2012 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 28 Desember 2012 | Berlaku | Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Pasal 20). | <p>a) Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>b) Materi Pasal PERBUP dapat mengatur Teknis Pelaksanaan secara keseluruhan dari PERDA.</p> <p>c) Materi PERBUP dapat saling terkait dengan PERDA No. 22 Thn 2012 ttg Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> | Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 21 Thn 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan | 28 Desember 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 20 Thn 2012 Tentang Izin Gangguan | 28 Desember 2012 | Tidak Punya Daya Guna | a) PERDA No. 20 Thn 2012 ttg Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan delegasi/perintah dari Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman | PERDA No. 20 Thn 2012 ttg Izin Gangguan, disarankan untuk dicabut. | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | TIDAK ADA PENGAJUAN UNTUK PENCABUTAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Penetapan Izin Gangguan Di Daerah pada Pasal 2 ayat (1), Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah.</p> <p>b) Telah terbit PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yang dalam pertimbangannya disebutkan bahwa bahwa PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu dicabut.</p> <p>c) Subtasnsi yang diatur dalam PERDA No. 20 Thn</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------|---|---|--|---|-----------------------|
| | | | | 2012 ttg Izin Gangguan mengenai Retribusi Izin Gangguang juga bertentangan dengan PERDA 1 Thn 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dareah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga PERDA No. 20 Thn 2012 sudah tidak dilaksanakan/diterapkan di Daerah. | | | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 19 Thn 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 | 28 Desember 2012 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 18 Thn 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara | 17 Desember 2012 | Berlaku | a) Berdasarkan Pasal 3 : Sumber dana penyertaan modal bersumber dari APBD yang dianggarkan mulai tahun sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kemampuan keuangan daerah. b) Masih diidentifikasi apakah Penyertaan Modal telah dilaksanakan. | Perlu diidentifikasi apakah apakah Dana Penyertaan Modal telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | BELUM TERIDENTIFIKASI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 17 Thn 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan | 05 Desember 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat | - | SELESAI |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|---|---|---|---------|
| | Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara | | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | | | Daerah | |
| 10 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara | 05 Desember 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 05 Desember 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 | 19 Oktober 2012 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | SELESAI |
| 13 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja | 19 Oktober 2012 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|----------------------------|--|--|--------------|
| | Daerah Tahun Anggaran 2011 | | | | | | | |
| 14 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Kesehatan | - | SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2012 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 14 Thn 2017 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Kesehatan | PERBUP No. 20 Thn 2017 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan. | SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pekerjaan Umum | - | SELESAI |
| 18 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan | 03 September 2012 | Berlaku | Berdasarkan peraturan perundang-undangan istilah Izin Mendirikan Bangunan sudah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | PERDA perlu segera diganti | Dinas Pekerjaan Umum | - | BELUM PROSES |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|---|---|--|---------------------|---------------|
| 19 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata | - | SELESAI |
| 20 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2012 Tentang Menara Telekomunikasi | 03 September 2012 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan sebagai berikut: a) Pasal 5 ayat (2): Rencana Induk Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD. b) Pasal 28 ayat (4): Tata Cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara diatur dengan Peraturan Bupati. c) Pasal 40 ayat (7): Ketentuan mengenai prosedur relokasi dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. dan d) Pasal 41: Hal yang belum diatur ditetapkan dengan PERBUP. | Menetapkan PERBUP sebagai Pedoman Teknis pelaksanaan PERDA. | Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 21 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------|
| | | | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | | |
| 22 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 03 September 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 23 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2012 Tentang Izin Usaha Perdagangan | 30 Juli 2012 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | - | BELUM SELESAI |
| 24 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2012 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf | 30 Juli 2012 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 Ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21, Pasal 29, Pasal 32 dan Pasal 45. | Menerbitkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan PERDA. | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | BELUM DIAJUKAN | BELUM SELESAI |
| 25 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 | 19 April 2012 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2025 | PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP ttg Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat 2) | Menerbitkan PERBUP ttg Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat 2). | Badan Perencana Pembangunan Daerah | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| Tahun 2011 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 23 Thn 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 | 27 Desember 2011 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 22 | 27 | Tidak Punya | PERDA ini tidak mempunyai | - | Bagian | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|---|-----------------------------|---|---------|
| | Thn 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 | Desember 2011 | Daya Guna | daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | Keuangan Sekretariat Daerah | | |
| 3 | Peraturan Daerah No. 21 Thn 2011 Tentang Pajak Hiburan | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 20 Thn 2011 Tentang Pajak Reklame | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 19 Thn 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 18 Thn 2011 Tentang Pajak Parkir | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 17 Thn 2011 Tentang Retribusi Penggantian | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|---|---------|
| | Biaya Cetak Peta | | dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | | |
| 8 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2011 Tentang Retribusi Terminal | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan | 29 November 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|--|---|---|---|---------|
| | | | Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | | |
| 13 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 | 24 November 2011 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 September 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 September 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 September 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 September 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|---|------------------------------------|---|---------|
| | | | Thn 2024 | | | | | |
| 18 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 Juli 2011 | Berlaku | PERDA mengamankan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2011. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 19 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 22 Maret 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 20 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum | 22 Maret 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 21 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet | 22 Maret 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 22 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan | 14 Maret 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|---|---|---|---|---------|
| | | | Thn 2024 | | | | | |
| 23 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 05 Januari 2011 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2010 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 20 Thn 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 | 27 Desember 2010 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 19 Thn 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada PT. Bank Penerimaan Rakyat Syariah Ibadurahman Penajam Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah | 09 Desember 2010 | Berlaku | PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan: a) Penganggaran APBD TA 2005. b) Penganggaran APBD TA 2006. c) Penganggaran APBD TA 2010. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 18 Thn 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | 09 Desember 2010 | Berlaku | PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan: a) Penganggaran APBD TA | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|--|---|--|---|---------|
| | Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur | | | 2003. b) Penganggaran APBD TA 2004. c) Penganggaran APBD TA 2005. d) Penganggaran APBD TA 2010. | | | | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2010 | 13 Oktober 2010 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2010 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009 | 11 Oktober 2010 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2010 Tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir | 16 Juni 2010 | Berlaku | - | - | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 1) PERBUP No. 12 Thn 2017 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir. 2) PERBUP No. 4 Thn 2022 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|--|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | Dengan Pola Dana Bergulir. | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara | 16 Juni 2010 | Berlaku | - | - | Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan; | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2010 Tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan | 16 Juni 2010 | Berlaku | PERDA ini mengamanatkan untuk membentuk PERBUP dalam 15 materi Muatan Pasal, yakni: Pasal 4 ayat(3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3). | a) Perlu menetapkan PERBUP yang mengatur pertunjuk pelaksanaan PERDA, walaupun ada beberapa PERBUP yang diterbitkan tetapi sebageian besar amanat PERDA menjadi muatan dalam pengaturan PERBUP. b) PERDA ini secara umum disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU ini masih berlaku, namun demikian perlu dilakukan evaluasi terkait regulasi baru sebagai penjabaran UU Sisdiknas tersebut. c) Berdasarkan hal tersebut diatas sangat terbuka untuk | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | a) PERBUP No. 32 Thn 2018 ttg Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah. b) PERBUP No. 16 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. (Mencabut PERBUP No. 18 Thn 2012). c) PERBUP No. 19 Thn 2020 ttg Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. d) PERBUP No. 54 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|---|---|--|---|---------|
| | | | | | dilakukan Penyempurnaan PERDA atau Pembentukan PERDA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. | | | |
| 9 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Giri Purwa Di Kecamatan Penajam | 16 Juni 2010 | Berlaku | Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2010 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 Februari 2010 | Berlaku | - | - | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 08 Februari 2010 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 | 08 Februari 2010 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---|---|---|---|---------|
| | Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | | Thn 2016 | | | | | |
| 13 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Labangka Barat Di Kecamatan Babulu | 08 Februari 2010 | Berlaku | Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Binuang Dan Desa Telemow Di Kecamatan Sepaku | 08 Februari 2010 | Berlaku | Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Sidorejo Di Kecamatan Penajam | 08 Februari 2010 | Berlaku | Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Bangun Mulya Di Kecamatan Waru | 08 Februari 2010 | Berlaku | Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Gunung Mulia Di Kecamatan Babulu | 08 Februari 2010 | Berlaku | Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 18 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2010 Tentang Pengelolaan Sampah | 08 Februari 2010 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Lingkungan Hidup | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|--|--|--|---|---|---------------|
| | | | Daerah No. 4 Thn 2021 | | | | | |
| 19 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 | 20 Januari 2010 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2009 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 31 Thn 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 | 24 Desember 2009 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 30 Thn 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 03 Desember 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 29 Thn 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa | 03 Desember 2009 | Berlaku | a) PERDA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. b) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. | a) Karena dalam PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 13 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|---|---|---------|
| | | | | <p>c) PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 89: Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>d) Telah diterbitkan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam PERBUP ini ketentuan RKPDesa dan RPJMDesa diatur, namun tidak lengkap pengaturan teknis penyusunan RPJMDesa.</p> | <p>terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norma pencabutan.</p> <p>b) Menyempurnakan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p> | | | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 28 Thn 2009 Tentang Penetapan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Diserahkan Kepada Desa | 03 Desember 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 27 | 10 | Tidak Punya | PERDA ini tidak mempunyai | - | Bagian | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|---|---|----------------|--|---|---------------|
| | Thn 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 | September 2009 | Daya Guna | daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | Keuangan Sekretariat Daerah | | |
| 6 | Peraturan Daerah No. 25 Thn 2009 Tentang Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan | 30 Juli 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan | - | BELUM SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 24 Thn 2009 Tentang Ijin Usaha Perikanan | 30 Juli 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan | - | BELUM SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 23 Thn 2009 Tentang Perijinan Budidaya Ikan | 30 Juli 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan | - | BELUM SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 22 Thn 2009 Tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan | 30 Juli 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 21 Thn 2009 Tentang Hutan Kota Kabupaten Penajam Paser Utara | 30 Juli 2009 | Berlaku | - | - | Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan | - | BELUM SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 20 Thn 2009 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum Dalam Penyediaan Sumber Daya | 30 Juli 2009 | Berlaku | - | - | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|--|--------------------------|---|---|---------------|
| | Tenaga Listrik | | | | | | | |
| 12 | Peraturan Daerah No. 19 Thn 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 04 Juni 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 13 | Peraturan Daerah No. 18 Thn 2009 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | 04 Juni 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah | - | BELUM SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 17 Thn 2009 Tentang Ketertiban Umum | 03 Juni 2009 | Berlaku | - | - | Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah | - | BELUM SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan | 04 Juni 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 25 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan | - | SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 04 Juni 2009 | Berlaku | a) PERDA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. b) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. | PERDA ini perlu Evaluasi | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | BELUM SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 14 | 04 Juni | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Badan | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------------------|---|---|---|-------------------------------|---------------|
| | Thn 2009 Tentang Sumber Pendapatan Desa | 2009 | | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | | |
| 18 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2009 Tentang Alokasi Dana Desa | 04 Juni 2009 | Tidak Punya Daya Guna | <p>a) Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada ketentuan yang mengatur Alokasi Dana Desa ADD, Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), bahwa Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Dan (Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>b) Hal ini diperkuat dengan dilaksanakannya Perintah PP tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa.</p> | Karena dalam PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 13 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norma pencabutan. | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | | SELESAI |
| 19 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2009 Tentang Pokok- | 04 Juni 2009 | (Tidak Berlaku) | a) Telah terbit PP No. 12 Tahun 2019 tentang | Perlu merevisi atau melakukan Pembentukan | Bagian Keuangan | SEDANG DALAM PROSES PENETAPAN | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|--|---|--|--------|---------------|
| | Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah | | Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 5 Thn 2025 | <p>Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>b) Dalam Pasal 100 PP No. 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Perda ini disebutkan juga dalam asal 3 huruf a PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.</p> | PERDA baru yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah. | Sekretariat Daerah | BUPATI | |
| 20 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2009 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Dan Pembangunan Daerah | 29 April 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah | - | BELUM SELESAI |
| 21 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2009 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan | 29 April 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan | - | SELESAI |

| | Usaha Milik Desa | | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | | | Desa | | |
|----|---|---------------|---------------------------------|--|--|---|--|---------|
| 22 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2009 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa | 29 April 2009 | Tidak Punya Daya Guna | 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 31 Ayata (2) dan Ayat (3) dan diperkuat Pasal 73 bahwa Sekretaris Desa mengoor dinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Dan | a) Karena dalam PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 9 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahaan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norrna pencabutan. b) Walaupun Pemerintah Daerah telah menetapkan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah iubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg 2) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 1) PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa. 2) PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg 2) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. | SELESAI |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal khusus lainnya.</p> <p>2) Karena berdasarkan perintah delegasi PERMENDAGRI tersebut PERDA No. 9 Thn 2009 tidak memiliki</p> | <p>APB Desa, tetapi beberapa hal yang belum diatur seperti sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa dan lain.</p> <p>c) Menyarangkan agar dapat dilakukan evaluasi apakah PERBUP No. 7 Thn 2019 disempurnakan atau dilakukan pemisahan pengaturan khusus Pedoma Penyusunan APB Desa terpisah dari Pedomen Pengelolaan Keuangan Desa.</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-----------------------|--|---|---|---|---------|
| | | | | <p>daya Guna;</p> <p>3) Perintah delegasi PER MENDAGRI telah dilaksanakan dengan ditetapkannya PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.</p> | | | | |
| 23 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2009 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa | 29 April 2009 | Tidak Punya Daya Guna | <p>a) Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada ketentuan mengatur Perangkat Desa Pasal 70: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>b) Walaupun dalam Permendagri 83 Thn 2015 dan Perubahannya tidak ada perintah delegasi Penetapan Perda/Perkada, namun dengan ditetapkannya PERDA No, 1 Thn 2015</p> | Karena dalam PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 8 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norrma pencabutan. | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---|--|----------------|---|---|---------------|
| | | | | <p>ttg Desa, menjadi PERDA No. 8 Thn 2009 tidak memiliki daya guna.</p> <p>karena dalam sesuai dengan Pasal 108 PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> | | | | |
| 24 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Desa | 29 April 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | - | SELESAI |
| 25 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 29 April 2009 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2018 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 26 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2009 Tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Paser Utara | 29 April 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | - | BELUM SELESAI |
| 27 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2009 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana Dan Tenaga Kesehatan | 29 April 2009 | Berlaku | Perlu Evaluasi | Perlu Evaluasi | Dinas Kesehatan | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--|---|---|---|---|---------|
| 28 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2009 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Dan Berita Daerah | 29 April 2009 | Berlaku | - | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 29 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 | 28 Januari 2009 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 30 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 | 28 Januari 2009 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencana Pembangunan Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2008 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara | 16 Oktober 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 16 Oktober 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Bupati No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga | 16 Oktober 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---|---|---|---|---------------|
| | Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | | Thn 2016 | | | | | |
| 4 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 16 Oktober 2008 | (Tidak Berlaku) Dicaput dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 16 Oktober 2008 | (Tidak Berlaku) Dicaput dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah | 16 Oktober 2008 | Berlaku | a) PERDA ini diterbitkan berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan PP ini merupakan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan telah diubah dengan UU Cipta Kerja terakhir dengan UU 6 Tahun 2023. | Mengevaluasi PERDA No. 8 Thn 2008 ttg Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|---|-------------------------|---|---------|
| | | | | <p>b) Namun UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 2007 telah beberapa kali diubah.</p> <p>c) Berdasarkan hal, seyogyanya PERDA No. 8 Thn 2008 ttg Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, dievaluasi apakah Substansi yang diatur termasuk lampiran detail kewenangan Daerah masih relevan atau ada yang tidak sesuai dengan Peraturan perundangan yang lebih tinggi.</p> | | | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 28 Agustus 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan | 28 Agustus 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri | 28 Agustus 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--|--|--|---|---|---------------|
| | | | Daerah No. 1 Thn 2024 | | | | | |
| 10 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan | 28 Agustus 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2013 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2008 Tentang Retribusi Jasa Laboratorium Dan Workshop | 28 Agustus 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar | 28 Agustus 2008 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2013 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 13 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 | 13 Agustus 2008 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2007 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 17 Thn 2007 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan | 14 Desember 2007 | Berlaku | a) PERDA ini telal mengatur sekitar 20 Pasal yang memerintahkan pemberntukan PERBUP sebagai pedoman pelaksanaan. b) Telah terbit PERDA No. | a) Menyarankan untuk melakukan evaluasi Materi PERDA apakah ada yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, | Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|--|---|---------------|
| | | | | <p>10 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>c) Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> | b) Menyarankan membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA. | | | |
| 2 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2007 Tentang | 13 Desember | Berlaku | Setelah terbitnya Peraturan-perundangan sebagai berikut: | Mengevaluasi PERDA No. 14 Thn 2007 ttg | Bagian Keuangan | - | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <p>Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara</p> | <p>2007</p> | | <p>a) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Piesiden, dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>b) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.</p> <p>c) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>d) PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban</p> | <p>Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> | <p>Sekretariat Daerah</p> | | |
|---|-------------|--|--|--|---------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|---|--|---|---------|
| | | | | <p>Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020.</p> <p>e) PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; seyogyanya dilakukan evaluasi terhadap PERDA No. 14 Thn 2007 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melakukan strukturisasi ulang mana yang diatur di PERDA, agar tidak telalu berpengaruh apabila ada Peraturan yang lebih tinggi terbit, dan materi mana dapat didelegasikan pada PERBUP sebagai pedoman teknis pelaksanaan.</p> | | | | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2007 Tentang Perubahan Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2007 Tentang | 14 Desember | (Tidak Berlaku) | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|--------------------------------|--|---------------|
| | Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 2007 | Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008 | | | Kepegawaian Sekretariat Daerah | | |
| 7 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan | 14 Desember 2007 | Berlaku | <p>a) Dalam PERDA memuat Perangkat Daerah sebagai pembantu Kepala Daeah dalam mengelola urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seprti Dinas Kehutanan dan Perkebunan sementara yang ada saat bidang perkebunan diurus oleh Perangkat Daerah Dinas Pertanian.</p> <p>b) Dalam PERBUP No. 52 Thn 2024 ttg Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak ada mengatur tentang izin Pemanfaatan Kayu, sehingga Pemerintah Daerah harus mencermati regulasi ini</p> | Melakukan evaluasi terhadap PERDA No. 11 Thn 2007 ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan, terkait keberlakuan, muatan materi yang diatur atau penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|---|---|--|---|---------|
| | | | | agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini. | | | | |
| 8 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | - | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2007 Tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | - | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa | 14 Desember 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | - | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam | 23 Agustus 2007 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|--|---|--|------------------------------|---------------|
| | Paser Utara Tahun 2007 | | | | | | | |
| 13 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2007 Tentang Peningkatan Status Kantor Perhubungan Dan Pariwisata Menjadi Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara | 30 Mei 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 14 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2007 Tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara | 30 Mei 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2007 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 30 Mei 2007 | Berlaku | a) Dalam PERDA ini, secara khusus tidak ada Pasal memerintahkan untuk membuat Pedoman Pelaksanaan dari PERDA, kecuali Pasal 18 yang dapat dianggap pasal delegasi blanko; b) Namun demikian, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Penjabaran PERDA ini melalui Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan. | Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Penajam Paser Utara. | Dinas Pertanian | TIDAK ADA PENGAJUAN | BELUM SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2007 Tentang Ijin Reklame | 30 Mei 2007 | Berlaku | Dalam PERDA ini sekitar 10 Pasal yang mengatur kewenangan penetapan Bupati dalam pelaksanaan Reklame termasuk aturan | Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA. | Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah | TIDAK ADA PENGAJUAN RAPERBUP | BELUM SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---|---|---|--|---|---------|
| | | | | teknis pelaksanaannya, yakni: pada Pasal 1 angka 38, Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) serta Pasal 19. | | | | |
| 17 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2007 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan | 30 Mei 2007 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah | - | SELESAI |
| Tahun 2006 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 | 29 Juni 2006 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Pelabuhan Khusus | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Angkutan Umum Di Jalan | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2011 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 9 | 17 April | (Tidak | PERDA ini sudah tidak | - | Dinas | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|---|---------|
| | Thn 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal | 2006 | Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013 | berlaku. | | Pendapatan Daerah | | |
| 5 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 14 Thn 2011 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 9 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2006 Tentang Retribusi Terminal | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|---|---|---|--|---|---------|
| | | | dengan Peraturan Daerah No. 15 Thn 2011 | | | | | |
| 10 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2006 Tentang Pajak Reklame | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 20 Thn 2011 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2006 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 5 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Dinas Pendapatan Daerah | - | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 17 April 2006 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2005 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 | 28 Desember 2005 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi | 22 Desember 2005 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--------------------------------|---|--|---|---------------|
| | Dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | | Daerah No. 11 Thn 2008 | | | | | |
| 3 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 22 Desember 2005 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2005 Tentang Izin Pengelolaan Logam Tua | 22 Desember 2005 | Berlaku | - | Agar dilakukan Evluasi terhadap PERDA ini | Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah | - | BELUM SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 22 Desember 2005 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Penajam Paser Utara | 22 Desember 2005 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2005 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara | 22 Desember 2005 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2020 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 8 | Peraturan Daerah No. 4 | 22 | (Tidak | | | Kantor | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---|--|---|---|--|---------|
| | Thn 2005 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga di Kabupaten Penajam Paser Utara | Desember 2005 | Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 21 Thn 2012 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | | |
| 9 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 | 19 Agustus 2005 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | | SELESAI |
| 10 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Penajam Paser Utara | 22 Juli 2005 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 7 Thn 2017 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara | 22 Juli 2005 | Berlaku | PERDA ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengimngat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai dasar masih belum ada perubahan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | | SELESAI |
| Tahun 2004 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 18 Thn 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 | 20 Desember 2004 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | | SELESAI |
| 2 | Peraturan Daerah No. 17 | 09 Juli 2004 | Tidak Punya | PERDA ini tidak mempunyai | - | Bagian | | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------|---|---|--|---|---------|
| | Thn 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 | | Daya Guna | daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | Keuangan Sekretariat Daerah | | |
| 3 | Peraturan Daerah No. 16 Thn 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2003 | 08 Juli 2004 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 15 Thn 2004 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 | 07 Juli 2004 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - | SELESAI |
| 5 | Peraturan Daerah No. 14 Thn 2004 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 | 07 Juli 2004 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - | SELESAI |
| 6 | Peraturan Daerah No. 13 Thn 2004 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008 | 07 Juli 2004 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | - | SELESAI |
| 7 | Peraturan Daerah No. 12 Thn 2004 Tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara | 07 Juli 2004 | Berlaku | PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA. | - | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | |
| 8 | Peraturan Daerah No. 11 Thn 2004 Tentang Rencana Tata Ruang | 07 Juli 2004 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah | - | Dinas Permukiman dan Prasarana | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|--|---|--|---|---------|
| | Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012 | | | melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | | Wilayah | | |
| 9 | Peraturan Daerah No. 10 Thn 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | Berlaku | | | Dinas Pendapatan Daerah | | |
| 10 | Peraturan Daerah No. 9 Thn 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2022 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 11 | Peraturan Daerah No. 8 Thn 2004 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2007 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | - | SELESAI |
| 12 | Peraturan Daerah No. 7 Thn 2004 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 7 Thn 2007 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial | - | SELESAI |
| 13 | Peraturan Daerah No. 6 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|---|--|---|---------|
| | | | 11 Thn 2008 | | | | | |
| 14 | Peraturan Daerah No. 5 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 15 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 16 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2006 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 17 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2004 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | Berlaku | PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA. | - | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 18 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara | 29 April 2004 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2008 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| Tahun 2003 | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Daerah No. 4 Thn 2003 Tentang | 17 Desember | (Tidak Berlaku) | PERDA ini sudah tidak | - | Bagian Ekonomi Sekretariat | - | SELESAI |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|--|---|---------|
| | Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Daerah | 2003 | Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017 | berlaku. | | Daerah | | |
| 2 | Peraturan Daerah No. 3 Thn 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 23 Juli 2003 | Tidak Punya Daya Guna | PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan. | - | Bagian Keuangan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 3 | Peraturan Daerah No. 2 Thn 2003 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 11 April 2003 | Berlaku | PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA. | - | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah | - | SELESAI |
| 4 | Peraturan Daerah No. 1 Thn 2003 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | 11 April 2003 | (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2009 | PERDA ini sudah tidak berlaku. | - | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | - | SELESAI |